

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Suandy, Erly, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Pudyatmoko, Y. Sri 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan edisi revisi tahun 2009*, Andi: Yogyakarta: Andi.

Sari, Diana, 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT.Refika Aditama.

Rahayu, Siti Kurnia, 2010, *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Bandung: Alumni.

Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.

Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto, 2014, *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Helle, Sven-Erik, 2016, *Defining the playing field: A framework for analysing fairness in access to resources, media and the law*, Z Vgl Polit Wiss (Suppl).

B. Skripsi/Tesis

Suwondo, Herry, 2007, *Model Pemajakan Atas Transaksi E-commerce (Pembelajaran Dari Jepang Dan Australia)*, Tesis, Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok.

Yustika Sari, Anggia, 2018, *Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-commerce*, Skripsi, Program Sarjana Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Rahman Tibahary, Abdul, 2016, “Analisis Yuridis Terhadap Laporan Pajak Terutang Atas Transaksi *E-commerce* Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

C. Jurnal

Busroh, Firman Freaddy, “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”, *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017.

Tanuwijaya, Fanny, “Membangun Negara Hukum Yang Kuat Melalui Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Konstitusionalitas”, *Yurispruden*, Vol. 1, No. 2, Juni 2018.

Barnes, Stuart J., & Richard T. Vidgen, “An Integrative Approach to The Assessment of *E-commerce* Quality”. *Journal of Electronic Commerce Research*, Vol. 3, No. 3. Juni 2012

Puspita Sari, Ririn, “Kebijakan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*”, *Akuntabel (Jurnal Akuntansi Universitas Airlangga)*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *E-commerce*”, *Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019 Buku 2: ”Sosial dan Humaniora”*, Agustus 2019

D. Majalah

Kemp, Simon, 2020, “Digital 2020: Indonesia”, 18 Februari 2020.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/G20 Base Erosion and Profit Shifting, “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report”, Oktober 2015

Trepelkov, Alexander, Harry Tonino dan Dominika Halka, “United Nations Handbook on Selected Issues in Protecting the Tax Base of Developing Countries Second Edition”, Agustus 2017

Department of Economic and Social Affairs, “International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Rev.IV”, 2008

Das, Kaushik, dkk, “The digital archipelago: How online commerce is driving Indonesia’s economic development”, McKinsey&Company Executive Summary, Agustus 2018.

Office *of the* United States Trade Representative Executive Office Of The President, “Status Update on Digital Services Tax Investigations of Brazil, the Czech Republic, the European Union, and Indonesia”, 13 Januari 2021

KPMG International Limited, “Taxation of the digitalized economy”, 15 Januari 2021.

KPMG Global Indirect Tax Advisor webcast series, “EU 2021 VAT E-Commerce”, 8 June 2021.

Bloomberg Tax, “Poland’s Government Plans to Approve New Ad Tax Bill in 1Q,” 2 Februari 2021.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Addressing The Tax Challenges Of The Digitalisation Of The Economy”, Februari 2019

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “OECD Digital Economy Outlook 2015”, Juli 2015

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online Sales”, Maret 2019

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke 4

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Peghasilan (PPh)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 / PMK.03 / 2020 Tentang Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2020 Tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-07/PJ/2020 Tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak Dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

F. Artikel

Tegar, Alif Radix, , “Meraba Tantangan Perpajakan di Era Ekonomi Digital Bagian 1”, *Direktorat Jenderal Pajak*, 30 Juli 2018

Pangastuti, Triyan, "Penerimaan Pajak Digital Baru Capai Rp 616 Miliar", *Investor*, 27 Desember 2020

Dwi Nugroho, Andrianto, 2020, "Penegakan Hukum Pajak *E-commerce*, Menyoal Level Playing Field", *Ekonomi Bisnis*, 31 Agustus 2020

Lestari, Reni, "India Pungut Pajak Digital Tahun Depan", *Ekonomi Bisnis*, 4 Mei 2021

Wildan, Muhamad, "*E-commerce* Asing yang Memiliki Cabang Domestik Bebas Pajak Digital", *DDTC*, 25 Maret 2021

Fictor, "AS menolak Pajak Digital India", *Pajakku*, 2 Oktober 2020

Chong, Clara, "Over 100 overseas digital vendors register for GST", *The Straits Times*, 10 Desember 2020

Nugroho, Andi, "Per 1 Januari, Singapura Kenakan Pajak Digital Layanan Asing", *Cyberthreat*, 1 Januari 2020

Agritama Prasetyanto, "Ragam Regulasi Pajak *E-commerce* di Dunia", *Kumparan*, 8 Februari 2018

Yusuf Imam Santoso, "Tujuh negara ini sudah pungut pajak digital, bagaimana dengan Indonesia?", *Kontan*, 9 Februari 2020

G. Internet

Hidayat, Asrul, "Tackling the challenges of digital tax and BEPS in Indonesia", <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/07/29/tackling-the-challenges-of-digital-tax-and-beps-in-indonesia.html>, diakses pada 26 Mei 2021

OECD, "Levelling the playing field", <https://www.oecd.org/trade/topics/levelling-the-playing-field/>, diakses pada 5 November 2021

Kemenkeu, PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Akan Dikenakan Mulai 1 Juli 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ppn-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-akan-dikenakan-mulai-1-juli-2020/>.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, “PPN Impor Produk Digital”, <https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital>, diakses 2 Desember 2020

KPMG International, “Austria: Update on digital services tax” <https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/02/tnf-austria-update-digital-services-tax.html>, diakses 23 Mei 2021

KPMG International, “Spain: Digital services tax finalized, effective in January 2021” <https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/10/tnf-spain-digital-services-tax-finalized-effective-in-january-2021.html>, diakses 23 Mei 2021

KPMG International, “France: Draft administrative regulations, scope of digital services tax” <https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/03/tnf-france-draft-administrative-regulations-scope-digital-services-tax.html>, diakses 23 Mei 2021

Switzerland Global Enterprise, “Overview Of The Swiss Tax System”, <https://www.s-ge.com/sites/default/files/publication/free/ihb-10-overview-of-the-swiss-tax-system-s-ge-2018-07.pdf>, diakses 24 Mei 2021

European Commission, “Fair Taxation of the Digital Economy”, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en, diakses 24 Mei 2021